7.1 Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat antar umat beragama yang saling menghormati dan menghargai iman dan kepercayaan masing-masing. 2. Terwujudnya sikap dan perilaku rukun, toleransi, dan gotong-royong.	Meningkatkan kualitas wadah pembinaan masyarakat berbasis agama. Mengikutsertakan tokoh-tokoh agama untuk membina masyarakat. Memberikan dukungan operasional lembaga sosial keagamaan yang ada di tengah masyarakat.	Mengoptimalkan peran lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.	Persentase pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial keagamaan masyarakat. Jumlah pembinaan masyarakat dalam upaya menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	100% 40%	100% 80%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bagian Kesra, Setda, Kantor Kesbangpol & Linmas, Kecamatan, Kelurahan, Kantor Satpol PP, Dinas Pendidikan
3. Terwujudnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara.	Mengintegrasikan semua tokoh dan lembaga sosial keagamaan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan daerah.	Implementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara.	Persentase pelibatan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan dalam proses pembangunan daerah.	100%	100%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
4. Terminimalisirnya berbagai isu sara yang berpotensi menimbulkan konflik, dan mencari solusi secara damai jika terjadi konflik agama	Membentuk dan merevitalisasi FKUB. Mendukung FKUB dalam melaksanakan fungsinya. Mengembangkan FKUB untuk juga membina kerukunan antar umat beda agama.	Membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh lembaga mitra (FKUB).	40%	80%	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.	

5. Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama yang telah dicapai.	Mengedepankan FKUB dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kerukunan hidup umat beragama.	Memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antar umat beragama.	Persentase jumlah permasalahan kerukunan hidup umat beragama dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui FKUB.	100%	100%	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.	
6. Terwujudnya generasi muda yang memegang prinsip nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal.	Mengidentifikasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal (adat) yang harus dilestarikan. Menginternalisasikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal (adat) melalui lembaga formal maupun informal masyarakat. Memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai tradisional, kearifan lokal, dan keagamaan.	Menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu, terutama pada kalangan generasi muda sebagai upaya peningkatan peran sertanya dalam pembangunan.	Jumlah sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat.	0	5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.2 Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 7.2.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya kepemimpinan yang mencerminkan kapasitas untuk mendorong pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah sesuai dengan nilai yang disepakati, serta kapasitas membangun kepercayaan dan langkah-langkah nyata.	Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi. Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan. Memberikan motivasi, inspirasi, mendukung pegawai, serta menjadi panutan. Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan.	Mengembangkan kepemimpinan yang bisa berdiri didepan memberi teladan, ditengah membangun semangat dan motivasi kerja, dan dibelakang memberi kekuatan kerja.	Capaian peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	100%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
			Persentase jumlah raperda yang dihasilkan dalam satu tahun anggaran.	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
			Persentase pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan.	100%	100%			
			Persentase pelaksanaan kunjungan kerja sebagai perbandingan kemajuan daerah dan masukan pengembangan daerah.	100%	100%			
			Persentase pelaksanaan pendidikan/pelatihan untuk pengembangan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.	100%	100%			
			Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.	0%	90%	Program Pendidikan Kedinasan	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah

			Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah Aparatur perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.	0% 0%	50% 40%			
			Persentase jumlah pejabat struktural yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & prajabatan. Persentase jumlah pejabat struktural laki-laki yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan. Persentase jumlah pejabat struktural perempuan yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan.	0% 0% 0%	85% 50% 35%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
2. Terwujudnya perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil kerja dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan masa yang akan datang. Mengembangkan, mengkaji, serta memperbarui rencana strategis dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya. Melaksanakan rencana strategis.	Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola sistem perekaman data dan informasi yang valid dan terbaru yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah partisiparif, transparan, dan akuntabel menuju modernisasi dan inovasi demi kepentingan bersama.	Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi kondisi umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini.	0	100%	Program Pengembangan Data	Perencanaan Pe**m**bangunan	Bappeda, semua SKPD
			Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam proses penyusunan perencanaan daerah. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang	3 kali 1	14 kali 2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, semua SKPD

	Merencanakan, melaksanakan, dan mengkaji modernisasi dan inovasi.		berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda/Perkada. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perkada. Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. Tersedianya dokumen Renja SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran.	5 36 36 5	10 72 216 30			
3. Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mencapai tujuan organisasi.	Merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas SDM aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan rencana strategis dan roadmap reformasi birokrasi. Mengidentifikasi, mengembangkan, dan menggunakan kompetensi pegawai, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan pemberdayaan.	Mengembangkan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki daya untuk memberdayakan aparatur-aparaturnya dan lebih berdayaguna untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pembangunan daerah.	Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan proyeksi penganggaran pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. Tingkat kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan dengan tugas dan fungsi di dalam masing-masing SKPD.	5 75%	10 100%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, semua SKPD
			Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Persentase jumlah aparatur	18% 10%	68% 40%	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Pemerintahan Umum	Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah

			pemeriksa dan pengawas laki-laki yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Persentase jumlah aparatur pemeriksa dan pengawas perempuan yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.	8%	20%			
			Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. Persentase jumlah Aparatur perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional.	0% 0% 0%	90% 50% 40%	Program Pendidikan Kedinasan	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi
			Persentase jumlah aparatur yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. Persentase jumlah aparatur laki-laki yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. Persentase jumlah aparatur perempuan yang mengikuti program peningkatan	0% 0% 0%	80% 50% 30%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi

			sumberdaya aparatur.					
			Persentase jumlah sumber daya aparatur yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. Persentase jumlah sumber daya aparatur laki-laki yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. Persentase jumlah sumber daya aparatur perempuan yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur.	0% 0% 0%	90% 60% 30%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi
			Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa laki-laki yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa perempuan yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.	50% 40% 10%	100% 70% 30%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi, Kelurahan

			Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan laki-laki yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan perempuan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.	50% 40% 10%	100% 70% 30%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemerintahan Umum	Dishubkominfo, semua SKPD
4. Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola sumber daya untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja	Pengelolaan keuangan. Pengelolaan informasi dan pengetahuan. Pengelolaan teknologi. Pengelolaan fasilitas.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu memberdayakan kemampuan keuangan, informasi, pengetahuan, dan fasilitas yang dimiliki daerah dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi komunikasi.	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	100%	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan Daerah
			Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.	100%	100%	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintahan Umum	Bagian Keuangan, Bagian Pemerintahan
			Cakupan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.	30%	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan
3. Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan	Pengelolaan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bijaksana dalam memberdayakan para	Cakupan kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah.	100%	100%	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan

mengelola kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja.	Pengelolaan dan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat	pemangku kepentingan dalam sebuah kemitraan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Cakupan pelibatan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa.	96%	100%	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra dan Kemasyarakatan, BPMPKB, Kelurahan
4. Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu mengidentifikasi, mengelola, meningkatkan, dan membangun proses inti, proses manajemen, dan proses pendukung untuk mengimplementasikan dan mendukung rencana strategis dan roadmap organisasi.	Mengidentifikasi, merancang, menerapkan, dan memperbaiki proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/ pengguna layanan. Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/ pengguna layanan.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai sistem proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, yang dapat meningkatkan hasil capaian dalam tugas pelayanan dan pembangunan daerah.	Persentase capaian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	10,38%	58,50%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemerintahan Umum	Inspektorat
			Persentase capaian program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	1,03%	95,86%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pemerintahan Umum	Inspektorat
			Persentase capaian perumusan dan implementasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi semua SKPD sesuai tugas dan fungsinya.	0%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah
5. Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota dalam bidang perizinan	Mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diperlukan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia pelaksana, kebijakan terkait pelimpahan kewenangan perijinan kepada camat,	Optimalisasi peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan infrastruktur pelaksanaan PATEN.	0%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kesekretariatan	Bagian Pemerintahan, Kecamatan
			Persentase penyediaan dan pemanfaatan sistem informasi PATEN.	0%	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemerintahan Umum	Dishubkominfo

maupun non perizinan.	dan alokasi anggaran bagi kecamatan. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan PATEN yang meliputi penyusunan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan, penyusunan tata cara pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan, serta pemberian sanksi dan penghargaan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PATEN terkait ketersediaan fasilitas, proses pelaksanaan, dan penggunaan anggaran.	menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan memperhatikan kebutuhan serta tuntutan masyarakat dalam pelayanan.	Persentase keterpenuhan sumber daya aparatur pelaksana PATEN.	0%	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Pemerintahan
			Keberadaan kebijakan terkait pelimpahan wewenang kepada camat terkait PATEN.	Tidak ada	Ada	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Bagian Hukum
			Keberadaan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan pelaksana PATEN.	Tidak ada	Ada	Program Pendidikan Kedinasan	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
			Ketersediaan tata cara pembinaan dan pelaksanaan PATEN. Persentase cakupan pembinaan pelaksanaan PATEN.	Tidak ada 0%	Ada 100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
			Ketersediaan tata cara pengawasan dan pelaporan PATEN.	Tidak ada	Ada	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Inspektorat
			Persentase cakupan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan PATEN.	0%	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemerintahan Umum	Inspektorat, Bagian Pemerintahan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.3 Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik

Tabel 7.3.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya sistem bertani organik. 2. Terwujudnya perubahan pola pikir masyarakat petani dan organisasinya dari pertanian non organik menjadi pertanian organik yang berwawasan kesehatan. 3. Terwujudnya produk pertanian organik.	Menyusun masterplan pertanian go organik. Menetapkan kawasan pertanian organik beserta jenis tanaman sebagai pilot project. Memenuhi berbagai kebutuhan penunjang budidaya pertanian organik (bibit unggul, obat-obatan, pupuk, dan teknologi organik). Melakukan pembinaan kepada petani dan lembaga petani mengenai keunggulan pertanian organik dan keahlian pertanian organik berwawasan kesehatan.	Pengembangan pertanian organik dalam rangka menghasilkan produk unggulan yang berkualitas.	Jumlah paket pengembangan kawasan organik. Jumlah paket pelatihan pertanian organik.	4 0	14 5	Program Pengembangan Pertanian Organik	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
4. Terwujudnya kemantapan proses pengembangan pertanian organik. 5. Terwujudnya diversifikasi pertanian organik.	Meningkatkan intensitas pengembangan pilot project budidaya pertanian organik. Menganekaragamkan jenis tanaman yang diproses secara organik.	Memantapkan proses pengembangan pertanian organik, dan menciptakan diversifikasi produk unggulan berkualitas.	Jumlah jenis tanaman yang dikelola secara organik.	9	25	Program Pengembangan Pertanian Organik	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan

6. Terwujudnya pasar induk agribisnis.	Membangun pusat perdagangan hasil pertanian dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Mendukung pemanfaatan pusat perdagangan ini agar dapat berfungsi optimal.	Pembangunan pasar induk agribisnis.	Cakupan upaya pemasaran hasil produksi pertanian.	0 paket	10 paket	Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
7. Terwujudnya penguatan agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.	Mengarahkan semua pelaku agrobisnis untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pertanian dalam rangka merebut pasar nasional maupun internasional. Menggencarkan promosi hasil pertanian ke dalam pasar nasional dan internasional.	Penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparatif menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.	Ketersediaan informasi produksi pertanian/ perkebunan.	0 paket	5 paket	Program Pengembangan Agrobisnis	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
8. Terwujudnya penguatan aspek pasar.	Memantau dan menjaga stabilitas mekanisme pasar agar tidak terganggu oleh tindakan spekulan yang dapat merusak akses pasar Menanggulangi tindakan mengacaukan harga.	Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.	Stabilitas harga dan pasokan pangan. (SPM)	50 %	90 %	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan
9. Terwujudnya sistem informasi produksi, distribusi, dan pasar komoditas pertanian.	Mengembangkan sarana informasi untuk menginformasikan berbagai informasi pasar komoditas pertanian.	Pengembangan sistem informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai wilayah kecamatan.	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah. (SPM)	15 %	90 %	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan
20. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan yang dapat diberikan kepada masyarakat petani.	Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Mengembangkan keahlian SDM penyuluh pertanian.	Pengembangan SDM penyuluh pertanian dan sarana prasarana untuk mendukung pengembangan pertanian organik.	Persentase jumlah penyuluh pertanian yang mendapat update pengetahuan pertanian organik. Ketersediaan sarana penyuluhan pertanian.	50% 100%	100% 100%	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.4 Misi 4 : Meningkatkan Posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional

Tabel 7.4.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 4 : Meningkatkan Posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional "Batu Destination" berbasis budaya lokal dan agrowisata.	Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata kota yang berwawasan internasional dalam peraturan daerah. Menyusun strategi dan grand desain penyiapan sistem dan struktur sosial dalam mendukung kepariwisataan internasional. Menyusun kebijakan kepariwisataan dalam bentuk peraturan daerah. Memfasilitasi berdirinya Daerah Tujuan Wisata unggulan baru "ASEAN CULTURE PARK" yang berwawasan internasional. Mengembangkan Kota Batu secara makro menuju perwujudan *Batu Destination.* Mengembangkan desa/kelurahan menjadi "desa wisata" berdasarkan	Pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.	Jumlah obyek wisata unggulan berbasis budaya lokal dan agrowisata.	12	17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BPMPKB, Kelurahan

	pada potensi masing-masing wilayah. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan “Batu Destination”. Menyiapkan infrastruktur kepariwisataan internasional.							
2. Terwujudnya penguatan citra industri pariwisata Kota Batu dalam industri pariwisata internasional.	Menggelar event pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata secara rutin dalam skala regional, nasional, maupun internasional sebagai sajian wisata. Memantau sajian wisata Kota Batu supaya tetap mempertahankan basis budaya lokal dan agrowisata. Melakukan tindakan tertentu terhadap penyelewengan yang terjadi. Mengupayakan Kota Batu masuk dalam “international tourism directory”, “World Federation of Tourist Guide Association”, dan “World Tourism Organization.” Memenuhi standar sarana prasarana wisata internasional.	Penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.	Jumlah pembinaan terhadap elemen masyarakat dalam upaya pelibatan masyarakat dalam mendukung pariwisata. Keterpenuhan standar kepariwisataan internasional. Ketercantuman Kota Batu dalam direktori pariwisata nasional maupun internasional.	24 7 0	24 44 1	Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan

3. Tersebarluaskannya promosi keunggulan dan kenyamanan wisata Kota Batu.	Mempromosikan semua obyek kepariwisataan Kota Batu secara nasional dan internasional melalui media informasi yang efektif. Mengembangkan promosi langsung melalui Location Bassed Advertising. Memperkuat kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah berbatasan.	Promosi pariwisata daerah dan pencitraan Batu Kota Wisata. Promosi pariwisata daerah dan pemantapan city branding Batu sebagai Kota Wisata di tingkat nasional. Memperkuat kerjasama bidang pariwisata antar daerah dalam provinsi dan luar provinsi untuk peningkatan perekonomian daerah.	Jumlah kunjungan wisata. Jumlah upaya pemasaran pariwisata yang dilakukan melalui berbagai media dan LBA. Jumlah wujud kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.	2.547.855 10 …	17.772.104 108 …	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Tersedianya SDM kepariwisataan berkompentensi internasional. 5. Terwujudnya SDM kepariwisataan dengan standarisasi internasional.	Melatih siswa kejuruan kepariwisataan melalui Praktek Kerja Langsung. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan wisata internasional untuk “Desa Wisata”. Meningkatkan profesionalitas para pekerja sektor pariwisata melalui pendidikan di Balai Latihan Kerja.	Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten dan profesional.	Jumlah pembinaan terhadap SDM pariwisata. Jumlah SDM pariwisata yang mendapat pembinaan.	24 10	34 100	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kecamatan, Kelurahan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.5 Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah

Tabel 7.5.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terpeliharanya keberadaan investasi yang sudah ada. 2. Masuknya investor baru ke Kota Batu. 3. Berkembangnya kerjasama investasi antara pemerintah dan swasta dari dalam dan luar negeri.	Menyediakan informasi yang berhubungan dengan bidang usaha unggulan daerah. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan berbagai potensi sumber daya unggulan daerah.	Mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.	Cakupan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. (SPM) Cakupan informasi berbagai potensi sumber daya unggulan daerah.	0 0	1 subdomain website, 8000 leaflet, 1500 booklet, 1000 DVD peluang investasi 10000 leaflet, 2500 booklet potensi sumber daya	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Bagian Pembangunan
4. Terciptanya peluang kerja padat karya bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aspek kesejahteraan. 5. Bergeraknya roda perekonomian masyarakat yang akan membawa efek berganda terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat.	Menyusun sistem perijinan dan penataan lingkungan usaha yang kondusif bagi penciptaan kepastian investasi. Memfasilitasi kerjasama investasi dengan pihak swasta.		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM) Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (SPM) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM)	2 0 0	1100 pelaku usaha 100% 1100 pelakku usaha	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Bagian Pembangunan

			Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negari, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SUrat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di satu kota sesuai kewenangan pemerintah kota. (SPM)	38 jenis ijin teknis sektoral	62 jenis ijin teknis sektoral dan penanaman modal, 5 Tanda Daftar Bidang Penanaman Modal			
	Mempromosikan semua potensi keunggulan wisata. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus.		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota. (SPM)	2	57	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)
6. Tersusunnya kebijakan investasi daerah.	Kajian regulasi investasi agar dapat lebih mengakomodasi ketertarikan investor untuk tetap atau hendak berinvestasi. Memperluas jaringan kerjasama investasi dengan daerah lain baik di Indonesia maupun negara lain. Membentuk konsorsium investasi daerah bersama dengan daerah lain.	Peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi, serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah-daerah lain, baik di Indonesia maupun negara-negara lain (sister city).	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antar Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi (KUMKMK) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional. (SPM)	1	12	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

7. Meningkatnya kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja. 8. Meningkatkan kurikulum, sarana, dan prasarana berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	Mendirikan Balai Latihan Kerja Pertanian dan Pariwisata. Menyusun kurikulum pelatihan tenaga kerja dengan peluang kerja yang ada, berbasis potensi lokal yang memiliki keunggulan, dan aspek kewirausahaan. Melatih calon tenaga kerja dengan kurikulum baru yang telah ditetapkan agar memiliki kompetensi dan daya saing sesuai kebutuhan pasar. Meningkatkan sarana prasarana pelatihan yang memadai. Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pelatih.	Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. (SPM) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja berbasis masyarakat. (SPM) Besaran pencari kerja yang terdaftar dan penempatan. (SPM)	45% 14% 10%	99% 58% 60%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan

9. Terbentuknya hubungan yang selaras antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. 10. Meningkatnya produktivitas dan kualitas kerja. 11. Meningkatnya kesejahteraan pekerja.	Membangun peluang-peluang kerja padat karya yang dikelola secara produktif dan professional. Menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai keberadaan dan hubungan antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja. Membentuk forum kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, dan asosiasi pekerja. Membangun kesepakatan bersama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.	Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. (SPM) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek. (SPM) Besaran pemeriksaan perusahaan. (SPM) Besaran pengujian peralatan di perusahaan. (SPM)	10% 0% 15% 0%	60% 50% 45% 50%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan, Kelurahan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.6 Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan

Tabel 7.6.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya kompetensi pendidik di setiap jenjang pendidikan.	Memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik di jenjang dasar dan menengah. Memfasilitasi uji kompetensi terhadap tenaga pendidik. Melaksanakan sertifikasi pendidik. Mengembangkan pendataan dan pemetaan pendidik. Mengembangkan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik.	Mendorong dan memacu pendidik untuk mau dan dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik agar dapat mengikuti laju perkembangan keilmuan sesuai dengan bidang studi yang diampu.	Persentase jumlah guru SD/MI yang menerima program peningkatan mutu pendidik. Persentase jumlah guru SMP/MTs yang menerima program peningkatan mutu pendidik. Persentase jumlah guru SMA/SMK/MA yang menerima program peningkatan mutu pendidik.	24,1 % 22,1 % 22,7 %	50 % 50 % 50 %	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah
2. Meningkatnya etika dari para pendidik.	Mengembangkan dan sosialisasi kode etik terhadap pendidik. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap aktifitas pendidik proses pendidikan.	Mendorong pendidik untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya sebagai pendidik secara profesional dan beretika.	Penurunan jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik. Jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik yang tertangani.	10 1	5 1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah
3. Terwujudnya lembaga pendidikan dasar jenjang SD dan SMP yang unggul.	Mengupayakan keterpenuhan rasio jumlah lembaga lembaga pendidikan dasar dengan jumlah siswa pendidikan	Memenuhi ketercapaian sumber daya manusia maupun sumber daya material yang dibutuhkan dalam proses belajar	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas.	100 %	100 %	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah

	dasar. Mengupayakan keterpenuhan standarisasi guru baik secara kuantitas, kualitas, maupun penyebarannya. Mengupayakan keterpenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan (ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, meja, kursi, peralatan praktikum, buku, fasilitas ekstrakurikuler, dsb) Mengembangkan metode belajar mengajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal. Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal.	mengajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional maupun keunggulan lokal.	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll) Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. Persentase jumlah SMP/ MTsyang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan	60,4 % 62,2 % 40 % 100 % 76,4 % 70,6 % 73,6 %	85 % 75 % 75 % 100 % 100 % 85 % 85 %			

			sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll).					
4. Terwujudnya lembaga pendidikan menengah yang unggul.	Mengupayakan keterpenuhan rasio jumlah lembaga lembaga pendidikan menengah. Mengupayakan keterpenuhan standarisasi guru baik secara kuantitas, kualitas, maupun penyebarannya. Mengupayakan keterpenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan (ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, meja, kursi, peralatan praktikum, buku, fasilitas ekstrakurikuler, dsb) Mengembangkan metode belajar mengajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal. Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal.	Memenuhi ketercapaian sumber daya manusia maupun sumber daya material yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional maupun keunggulan lokal di tingkat pendidikan dasar menengah.	Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll)	100 % 90,2 % 71,8 % 57,8 %	100 % 100 % 85 % 75 %	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah

5. Terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang mendukung potensi dan keunggulan Kota Batu. 6. Terwujudnya Kota Batu sebagai kota vokasi unggulan.	Mengembangkan kurikulum khusus (sesuai potensi dan keunggulan Kota Batu) untuk dimasukkan dalam pendidikan sekolah kejuruan di Kota Batu.	Mengembangkan pendidikan kejuruan yang lebih mengarahkan peserta didik untuk lebih siap mendukung sektor industri unggulan daerah Kota Batu.	Ketersediaan kurikulum khusus pertanian dan kepariwisataan yang dapat diterapkan di pendidikan formal maupun non formal.	2	15	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
7. Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan yang handal.	Mengembangkan data dan informasi pendidikan yang terbarukan dan akurat baik dari sisi peserta didik dan masyarakat, maupun pengelolaan pendidikan. Memantau pemanfaatan berbagai dana bantuan oleh sekolah. Melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam memantau pelaksanaan pendidikan. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap kinerja setiap lembaga pendidikan.	Mewujudkan pengelolaan pendidikan yang handal, memegang prinsip pelayanan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Persentase jumlah SD/MI yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Persentase jumlah SMP/MTs yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Persentase jumlah SD/MI yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. Persentase jumlah SMP/MTs yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala	100 % 100 % 100 % 75 % 64 %	100 % 100 % 100 % 100 % 80 %	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

			sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM.	66 %	90 %			

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.7 Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tabel 7.7.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan.	Mengadakan berbagai kebutuhan obat yang diproyeksi akan dibutuhkan. Menyebar persediaan obat secara merata kepada seluruh instansi pelayanan kesehatan masyarakat.	Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak. Memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.	76,47%	83%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.		Cakupan kunjungan puskesmas.	52,91%	65%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan melalui Diklat, Magang, Lokakarya dll.		Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pengembangan keahlian. (komulatif) a. Asuhan Persalinan Normal. b. ABBK. c. IVA test. d. Manajemen Asfiksi. e. Manajemen BBLR.	 30 10 20 30 20	 70 50 60 70 60	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Menstandarisasi pelayanan kesehatan dengan menyusun Protap, SOP (Standart Operating Sistem), dll.	menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	Persentase anggaran kesehatan dibandingkan APBD tingkat kota.	3,39%	4,5%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
5. Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan upaya pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular & tidak menular.		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. (SPM) a. AFP. b. Pneumonia balita. c. TB BTA positif. d. DBD. e. Diare. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. (SPM) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. (MDG's) Jumlah ODHA mendapat ARV. (MDG's) Cakupan desa/ kelurahan UCI. (SPM)	 2,09 5% 40,29% 100% 59,48% 100% 31,79% 60% 95,83	 >2 100% 80% 100% 90% 100% 100% 100% >95%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.		Cakupan kunjungan ibu hamil K4. (SPM) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. (SPM) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan. (SPM)	94,12% 84,12% 102,2%	95% 80% 100%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			Cakupan pelayanan ibu nifas. (SPM) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. (SPM) Cakupan kunjungan bayi. (SPM) Cakupan peserta KB aktif. (SPM)	101,3% 87,34% 92,4% 62,68%	100% 87% 92% 70%			
	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.		Cakupan pelayanan anak balita. (SPM) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. (SPM) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. (SPM) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. (SPM)	81,90% 94,68% 26,51% 54,12%	90% 100% 30% 50%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
	Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lansia.		Persentase lansia yang dilayani. Persentase puskesmas santun lansia.	55% 10%	70% 16%	Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
	Penyediaan tambahan makanan dan vitamin bagi masyarakat. Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. (SPM) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. (SPM)	100% 100%	100% 100%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
	Memantau kualitas makanan		Persentase PIRT terdaftar yang mengikuti penyuluhan	97%	100%	Program Pengawasan Obat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

	masyarakat.		keamanan pangan.			dan Makanan		
			Persentase TTU/TPM sehat.	46,92%	65%	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Menyelenggarakan penjaminan kesehatan kepada masyarakat.		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. (MDGs)	16,75%	20%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan.	Membina masyarakat untuk meningkatkan sanitasi lingkungan. Membina masyarakat untuk tidak buang air besar secara sembarangan. Melakukan uji kualitas air.		Cakupan masyarakat terlayani sanitasi dasar. (MDGs) Cakupan pengawasan kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi standard. (MDGs)	53,30% 57,1%	90% 90%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
7. Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mengikuti Program Keluarga Berencana. 8. Meningkatnya reproduksi sehat. 9. Terwujudnya keluarga berencana sejahtera.	Meningkatkan peran PLKB dalam pencapaian Program Keluarga Berencana. Meningkatkan KIE-KESPRO kepada masyarakat. Meningkatkan peranan PKK di seluruh wilayah dalam mewujudkan keluarga sejahtera.	Pemantapan akses layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau; terutama bagi pasangan usia subur. Serta ditunjang dengan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia remaja. *Pemantapan keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga kecil, dan mulai dirintis fungsi keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga sejahtera.*	Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%. (SPM) Cakupan sasaran pasangan usia subur yang ingin ber-KB aktif 65%. (SPM) Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) 5%. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB 87%. (SPM) Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga	2,19 79,58 19,5 70,42 86,89	2 80 17 75 89	Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan

			sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%. (SPM)					
			Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan. (SPM)	1 : 3	1 : 1			
			Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/ kelurahan. (SPM)	1 : 1	1 : 1			
			Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. (SPM)	2,7	25			
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun. (SPM)	100%	100%			
			Jumlah pembinaan kesehatan reproduksi kepada masyarakat.	0	15	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan
			Jumlah remaja yang memperoleh pembinaan kesehatan reproduksi.	0	755			

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.8 Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Tabel 7.8.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya infrastruktur perkantoran pemerintah kota.	Membangun gedung perkantoran pemerintah (block office).	Pengembangan infrastruktur wilayah, diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengoptimalkan sarana transportasi umum (angkutan dan terminal), serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah.	Persentase penyelesaian gedung perkantoran pemerintah dalam satu area perkantoran.	17,3%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Pekerjaan Umum	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Terwujudnya infrastruktur pendidikan SD Negeri dan SMA Negeri.	Membangun gedung sekolah SD Negeri dan SMA Negeri.		Persentase penyelesaian pembangunan SD Negeri. Persentase penyelesaian pembangunan SMA Negeri.	0% 0%	100% 100%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3. Terwujudnya infrastruktur kesehatan.	Membangun gedung bank darah.		Persentase penyelesaian pembangunan gedung bank darah.	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Kesehatan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4. Terwujudnya infrastruktur kearsipan dan perpustakaan.	Membangun gedung depo arsip dan perpustakaan.		Persentase penyelesaian pembangunan depo arsip.	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Kearsipan	Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Terwujudnya infrastruktur keolahragaan.	Membangun Gedung Olahraga beserta fasilitasnya yang memenuhi syarat dalam penyelenggaraan event olahraga nasional.		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga.	0%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Cipta Karya dan Tata

								Ruang
6. Terwujudnya infrastruktur perdagangan.	Membangun gedung pasar induk Kota Batu. Membangun pasar sentra Junrejo. Membangun pasar desa agropolitan. Penyediaan ruang bagi kegiatan informal (PKL).		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Induk. Persentase penyelesaian pembangunan pasar sentra Junrejo. Persentase penyelesaian pembangunan pasar desa agropolitan. Persentase penyelesaian penyediaan ruang bagi kegiatan informal (PKL).	0% 0% 0% 0%	100% 100% 100% 100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kecamatan, Kelurahan
7. Terwujudnya infrastruktur pertanian.	Membangun gedung pasar agrobisnis Kota Batu.		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Agrobisnis.	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
8. Terwujudnya infrastruktur koperasi dan UKM.	Membangun gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
9. Terwujudnya infrastruktur ketenagakerjaan.	Membangun gedung Balai Latihan Kerja (BLK).		Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK).	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
10. Terwujudnya fasilitas bina sosial.	Membangun gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan. Membangun balai		Persentase penyelesaian pembangunan gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan.	0%	100%	Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah	Sosial	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kecamatan, Kelurahan

	pertemuan dan pameran. Membangun gedung serbaguna dan lembaga sosial.		Persentase penyelesaian pembangunan balai pertemuan dan pameran. Persentase penyelesaian pembangunan gedung serbaguna & lembaga sosial.	0% 0%	100% 100%			
11. Terwujudnya infrastruktur pariwisata.	Membangun sarana wisata kereta gantung. Membangun rest area. Membangun Drive In Mengembangkan jalur festival wisata. Mengembangkan jalur mountain bike.		Persentase penyelesaian pembangunan sarana kereta gantung. Persentase penyelesaian pembangunan rest area. Persentase penyelesaian pembangunan Drive In. Persentase penyelesaian pengembangan jalur festival wisata. Persentase penyelesaian pengembangan jalur mountain bike.	0% 0% 0% 0% 0%	100% 100% 100% 100% 100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pengairan dan Bina Marga
12. Terwujudnya infrastruktur jalan. 13. Terwujudnya akses lalu lintas antar wilayah. 14. Meningkatnya dinamika masyarakat melalui ketersediaan sarana mobilisasi yang lebih baik.	Membangun jalan lingkar barat untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Membangun jalan lingkar utara untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Membangun jalan lingkungan pendukung desa wisata.		Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkar barat. Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara. Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkungan pendukung desa wisata.	0% 0% 0%	100% 100% 100%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pengairan dan Bina Marga
	Membangun jaringan jalan dan jembatan baru.		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. (SPM)	0 ruas jalan	6 ruas jalan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pengairan dan Bina Marga

			Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (SPM) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. (SPM)	37 ruas jalan 17 lokasi	209 ruas jalan 128 lokasi			
15. Terwujudnya infrastruktur transportasi.	Membangun terminal angkutan. Mengembangkan terminal tipe B. Mengembangkan terminal wisata.		Persentase penyelesaian pembangunan terminal angkutan. Persentase penyelesaian pembangunan terminal tipe B. Persentase penyelesaian pembangunan terminal wisata.	0% 0% 0%	100% 100% 100%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Dinas Pengairan dan Bina Marga
16. Meningkatnya infrastruktur dan sarana lalu lintas.	Meningkatkan fasilitas jalan raya.		Tersedianya halte pada setiap kota/kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. (SPM)	6	16	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi
			Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota/kabupaten. (SPM)	7662	9988	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi
17. Meningkatnya infrastruktur sanitasi lingkungan permukiman.	Mengembangkan infrastruktur dan pengelolaan penyediaan air bersih.		Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. (SPM) Persentase penduduk yg	38831 KK	40299 KK	Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan	Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

			memiliki akses penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan.					
	Mengembangkan infrastruktur pengolahan air limbah komunal dan fasilitas penyehatan lingkungan permukiman.		Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. (SPM) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. (SPM)	883 KK	1865 KK	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Mengembangkan infrastruktur drainase lingkungan.		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. (SPM)	16 titik	106 titik	Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan	Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Mengembangkan infrastruktur pengelolaan persampahan.		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan. (SPM)	6 paket alat pengolah sampah	4 gedung dan 16 paket alat pengolah sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.9 Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tabel 7.9.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintahan desa. 2. Terwujudnya budaya organisasi pemerintahan desa yang mendukung tugas dan fungsi sebagai ujung tombak pemerintah daerah kepada masyarakat.	Membina aparatur pemerintah desa dengan sistem kepegawaian yang terstandar. Menyebarkan penempatan PNS dalam pemerintahan desa. Pemberian insentif kepada aparatur desa non PNS.	Penguatan otonomi pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan.	Persentase jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.	96%	99%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang proses kerja pelayanan pemerintahan desa.	Memenuhi sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan. Memenuhi kebutuhan sarana teknologi informasi komunikasi.		Jumlah sarana prasarana kerja bagi pemerintahan desa.	96%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan
4. Terwujudnya sinergi kerja pemerintah desa dengan pemerintah daerah.	Menyelenggarakan forum komunikasi antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran		Jumlah koordinasi dan evaluasi terhadap sinergi kerja pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah. Pendampingan ADD. Pelantikan BPD.	97% 96% 100%	100% 100% 100%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan

	pembangunan desa, serta pengelolaan aset desa.		Pendampingan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa.	100%	100%			
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa.	Menyusun pedoman standar pelayanan. Mensosialisasi pedoman standar pelayanan kepada seluruh aparatur pemerintahan desa. Memfasilitasi pelaksanaan pedoman standar pelayanan untuk meningkat kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan desa.		Jumlah desa yang telah menerapkan standar pelayanan.	19 desa	114 desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Pemerintahan

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.10 Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis

Tabel 7.10.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya iklim demokrasi. 2. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial, politik, dan keagamanaan masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan demokratisasi. 3. Meningkatnya peran dan fungsi perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik. 4. Terwujudnya hubungan eksekutif dan legislatif yang lebih tertata.	Melaksanakan musrenbang baik di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, maupun kota. Memberikan kebebasan dan hak untuk ikut berpolitik bagi semua elemen masyarakat termasuk perempuan dan pemuda. Menyelenggarakan pendidikan politik dan semangat kebangsaan secara masiv terhadap masyarakat.	Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan kepemudaan dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (civil society), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penataan hubungan eksekutif dan legislatif.	Jumlah kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat. Jumlah kader parpol yang mendapat pendidikan politik.	1 150	6 900	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP, Bappeda, Kecamatan, Kelurahan
	Mengembangkan kapasitas dan profesionalisme lembaga demokrasi lokal. *Mendorong partai politik untuk membina kader-kadernya untuk mewujudkan kemandirian partai politik.* Mensinergikan aktifitas hubungan eksekutif dan legislatif dalam satu kerangka tujuan yang didasari penguatan etika organisasi.		Jumlah pembinaan terhadap partai politik.	0	6	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Setwan DRPD, Kecamatan, Kelurahan

	Mendukung penyelenggarakan pemilihan legislatif, presiden, dan DPD secara langsung, umum, bebas, rahasia, berbudaya, dan damai.							
5. Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga penegak hukum.	Meningkatkan peran satpol PP dalam menertibkan pelaksanaan perundang-undangan daerah dengan cara-cara yang berorientasi pada pelayanan prima. Melaksanakan kerjasama dengan aparatur penegak hukum dalam mendukung penegakan perundang-undangan daerah.	Penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).	Jumlah upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.	1 (Komunitas Intelejen Daerah / KOMINDA)	6 (Komunitas Intelejen Daerah / KOMINDA)	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol, Bagian Hukum
6. Menguatnya peran masyarakat dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan.	Membentuk dan menguatkan peran sistem keamanan lingkungan (siskamling). Mensinergikan aktifitas siskamling dengan lembaga penegak hukum terkait. Mengadakan pos-pos jaga di lingkungan masyarakat.	Pembangunan bidang keamanan lingkungan masyarakat diprioritaskan untuk membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.	Jumlah satuan/kelompok masyarakat pelaksana sistem keamanan lingkungan. Rasio ketersediaan pos keamanan lingkungan.	24	24	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol, Kantor Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan
7. Meningkatnya stabilitas dan keamanan lingkungan.	Mengembangkan sistem ketahanan sosial masyarakat dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan dari luar. Melakukan upaya preventif terhadap berbagai tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan baik	Meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum	Cakupan petugas perlindungan masyarakat. (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan. (SPM)	1768 petugas 100%	1768 petugas 100%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol, Kantor Satpol PP, Bagian Hukum, Kecamatan, Kelurahan

	oleh lembaga siskamling maupun aparat penegak hukum. Membina masyarakat mengenai kesadaran hukum melalui berbagai forum dalam masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat.	serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.						

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

7.11 Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

Tabel 7.11.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batu
Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas produksi melalui UKM.	Melakukan pembinaan terhadap UKM yang telah ada dalam masyarakat. Memfasilitasi UKM dalam hal sarana, permodalan, dan pemasaran.	Mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan UKM yang ada di tengah masyarakat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produksi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Jumlah UKM yang mengakses sistem informasi dan sumber daya produktif. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs) Jumlah mitra kerja yang menjadi pendaping kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs)	40 2 1	60 10 8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, BPMPKB
2. Meningkatnya kemampuan UKM dalam mengembangkan usahanya.	Menyelenggarakan pelatihan terhadap para pelaku UKM terkait dengan berbagai pengetahuan pengembangan usaha. Memfasilitasi UKM dengan penerapan teknologi tepat guna. Memfasilitasi berbagai upaya kerjasama dan kemitraan usaha. Memfasilitasi upaya perlindungan hukum	Mendorong kewirausahaan dan keunggulan kompetitif hasil usaha dalam upaya sebagai daya dorong keberlanjutan dan keberlangsungan UKM.	Jumlah peningkatan usaha skala mikro ke kecil. Persentase jumlah UKM yang mendapat fasilitas dan pendampingan. Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.	2066 24 % 1	2191 36 % 8	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, BPMPKB

	terhadap hasil produksi UKM.							
3. Meningkatnya kualitas upaya dalam memberdayakan perempuan melalui jalur koperasi dan UKM.	Memberikan pelatihan kerja dengan materi keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh sektor UKM. Memfasilitasi pemberdayakan perempuan yang telah terlatih agar dapat masuk dalam sektor industri. Memfasilitasi inkubator usaha-usaha ekonomi oleh perempuan dan kelompok perempuan.	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi.	Persentase jumlah perempuan usia produktif yang menerima program pemberdayaan. Persentase perempuan usia produktif yang mampu terlibat dalam bidang kerja baik secara mandiri maupun tidak mandiri.	0 orang 25%	480 orang 50%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan	BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan
4. Meningkatnya kemampuan produktif (skill) masyarakat PMKS. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan bagi masyarakat PMKS. 6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat PMKS minimal dalam memenuhi 3 kebutuhan pokok.	Mengidentifikasi perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat PMKS. Memberikan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh sektor UKM. Memfasilitasi PMKS yang telah terlatih agar dapat masuk dalam sektor UKM.	Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Peningkatan persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. (SPM)	16%	80%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpercil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan, Kelurahan

7. Terwujudnya KUMKM yang kuat dan mandiri, serta mampu mengembangkan kerjasama, potensi, dan kemampuan anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.	Menguatkan peran Koperasi Usaha Menengah Kecil Masyarakat terhadap UKM-UKM yang ada di tengah masyarakat. Memfasilitasi kinerja KUMKM dalam menjalankan fungsinya baik ke dalam (kepada UKM) maupun ke luar (perluasan jaringan kerjasama). Mengembangkan jaringan kerjasama antar koperasi.	Optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM, yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna; untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.	Jumlah lembaga koperasi aktif.	122	137	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Kecamatan, Kelurahan
8. Meningkatnya kualitas dan kehandalan KUMKM yang berhasil guna dan berdaya guna.	Memperbaiki sistem pengelolaan KUMKM untuk menghasilkan kinerja dan hasil kerja yang produktif, efisien, dan efektif. Meningkatkan sumber daya manusia yang mengelola KUMKM.	Peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya.	Jumlah lembaga koperasi yang mendapat pembinaan.	122	142	Program Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Kecamatan, Kelurahan
9. Terwujudnya inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.	Mengembangkan inkubator bisnis padat karya. Mengikutsertakan UMKM dalam pameran lokal, regional, nasional, dan internasional. Memfasilitasi pengembangan sarana pemasaran.	Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Kota Batu. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan di lingkup regional dan nasional.	Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.	1	8	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Kecamatan, Kelurahan

10. Meningkatnya konsolidasi dan jejaring semua sektor industri di Kota Batu untuk mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata.	Menyusun grand desain pengembangan industri hulu hilir dalam mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata. Memfasilitasi konsolidasi dan networking dari semua pelaku industri kecil menengah di Kota Batu, dari industri hulu sampai hilir, industri pariwisata, industri pertanian, industri perikanan, industri kerajinan, industri perhotelan, dll.	Bidang industri diprioritaskan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring *(networking)*, melalui: peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Kota Batu sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.	Jumlah KUB industri hulu hilir.	0	4	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bappeda
	Memfasilitasi pemenuhan modal dan sumber daya bagi industri kecil dan menengah.		Jumlah peningkatan industri kecil menjadi industri menengah.	10	20	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
11. Meningkatnya kemampuan dan daya saing industri.	Menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Memfasilitasi pengembangan industri kecil agar menjadi tangguh. Mengembangkan pembinaan strategi industri melalui pembentukan sentra dan cluster industri.	Penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh.	Jumlah IKM yang mendapat pembinaan iptek sistem produksi.	15	45	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, BPMPKB

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.